



APARATUR PEMERINTAH

## Skema Jam Kerja Baru ASN Tertunda

UMBULHARJO—Rencana penerapan skema jam kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja belum berjalan pada Maret 2026. Hingga kini, kebijakan tersebut masih tertahan karena menunggu arahan resmi dari Pemerintah Pusat.

**Kami masih menunggu petunjuk dari Pusat. Sampai saat ini belum ada surat resmi yang turun, jadi untuk uji coba di bulan Maret ini belum ada.**

Sarwanto

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja

Pemkot Jogja memastikan uji coba yang sempat diwacanakan tidak jadi dilakukan dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil karena belum adanya petunjuk teknis dari kementerian terkait.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja, Sarwanto, mengatakan jajarannya belum menerima surat edaran atau instruksi resmi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maupun dari Pemda DIY. "Kami masih menunggu petunjuk dari Pusat. Sampai saat ini belum ada surat resmi yang turun, jadi untuk uji coba di bulan Maret ini belum ada," ujarnya di Balai Kota Jogja, Jumat (27/3).

Meski demikian, skema jam kerja baru masih berpeluang diterapkan setelah Lebaran. Pelaksananya diperkirakan paling cepat pada pertengahan April, menyesuaikan kondisi serta libur nasional di awal bulan. "Kami lihat situasinya, kemungkinan paling cepat 10 April karena awal bulan ada libur. Namun, surat keputusan dari Wali Kota Jogja juga masih dalam proses," katanya.

Sambil menunggu kepastian, Pemkot Jogja telah menyiapkan sejumlah opsi skema kerja yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah penambahan satu jam kerja pada Senin hingga Kamis sehingga hari Jumat hanya memiliki durasi kerja sekitar 1,5 jam. Opsi lain berupa penambahan 30 menit kerja pada Senin hingga Kamis dengan jam kerja Jumat berakhir pukul 11.00 WIB.

Selain itu, terdapat alternatif skema yang mempertahankan jam kerja normal Senin hingga Kamis, namun menerapkan *work from home* (WFH) penuh pada hari Jumat.

Sarwanto menegaskan, skema apa pun yang nantinya diterapkan tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik seperti kesehatan, keamanan, Dinas Perhubungan, hingga Mal Pelayanan Publik tetap akan beroperasi secara tatap muka. "WFH tidak bisa dipukul rata. Instansi pelayanan publik tetap harus berjalan maksimal di kantor," katanya. *(Seto Nugroho)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man			

Yogyakarta, 22 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005